Pediamu : Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran
E-ISSN : 2808-764X
Vol. 1, No. 4 Oktober - Desember 2026
https://publishermu.com/index.php/pediamu/
DOI :

KONDISI FASILITAS DAN TANTANGAN KETERBATASAN INFRASTRUKTUR DALAM PEMBELAJARAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH LUAR BIASA DI KOTA MAKASSAR

Syamsuddin[1], Nurul Mutahara B[2], Muhammad Rizki K[3]
[1, 2, 3] Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
[1] syamsuddin6270@unm.ac.id, [2] nurul.mutahara@unm.ac.id, [3] rezky65k@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Published : 27 Nov 2026

Keywords

Keterbatasan fasilitas, sekolah luar biasa, anak berkebutuhan khusus, fisioterapi, infrastruktur sekolah.

Limited facilities, special school, students with special needs, physiotherapy, school infrastructure.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi fasilitas dan tantangan akibat keterbatasan infrastruktur dalam pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sebuah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Makassar yang melayani siswa tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui observasi dengan lembar observasi 27 butir dan wawancara dengan guru, lalu menganalisisnya secara tematik. Hasil observasi menunjukkan bahwa 23 dari 27 butir fasilitas tersedia, antara lain jalan miring, jalur pemandu tunanetra, toilet bagi siswa disabilitas, alat bantu belajar, air bersih, dan listrik. Namun, ruang terapi atau latihan mengurus diri belum ada dan fisioterapi bagi siswa tunadaksa masih kurang. Menurut guru, keterbatasan tersebut sangat menghambat pembelajaran. Sekolah mengatasinya dengan dana BOS, inisiatif guru membuat media melalui telepon genggam, dan upaya kepala sekolah baru mengadakan fasilitas tambahan. Fasilitas sekolah secara umum memadai, tetapi fisioterapi dan ruang terapi menjadi kebutuhan prioritas.

This study aims to describe the condition of facilities and the challenges caused by limited infrastructure in learning for students with special needs at a special school (SLB) in Makassar City serving students with visual, hearing, intellectual, physical, and autism-related barriers. This descriptive qualitative study collected data through a 27-item observation sheet and an interview with a teacher, then analyzed them thematically. The observation shows that 23 of 27 facility items were available, including ramps, guiding blocks, accessible toilets, learning aids, clean water, and electricity. However, there was no therapy or self-care training room, and physiotherapy for students with physical impairments was insufficient. According to the teacher, these limitations greatly hinder learning. The school copes through School Operational Assistance (BOS) funds, teachers' initiative in creating media with mobile phones, and the new principal's efforts to provide additional facilities. Facilities are generally adequate, but physiotherapy and therapy rooms are a priority need.

PENDAHULUAN

Setiap anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hambatan yang berbeda, sehingga kebutuhan sarana dan layanannya pun berbeda. Siswa tunanetra membutuhkan alat bantu baca dan jalur yang aman, siswa tunarungu membutuhkan media visual, sedangkan siswa tunadaksa membutuhkan akses fisik serta layanan terapi. Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi satuan pendidikan yang secara khusus melayani kebutuhan tersebut. Hak penyandang disabilitas atas pendidikan dan akomodasi yang layak dijamin antara lain oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.[1]

Kewajiban tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 yang mewajibkan satuan pendidikan menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, termasuk sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.[2] Ketentuan teknisnya diuraikan lebih lanjut dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 yang memuat bentuk-bentuk akomodasi, mulai dari penyesuaian pembelajaran hingga penyediaan media dan alat bantu sesuai ragam disabilitas.[3] Standar sarana dan prasarana satuan pendidikan diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023,[4] sedangkan pedoman teknis aksesibilitas bangunan, seperti jalan miring, jalur pemandu, dan toilet yang dapat diakses, telah lama tersedia dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006.[5] Dengan demikian, pemenuhan fasilitas di SLB bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan bagian dari pemenuhan hak peserta didik.

Sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini, yaitu sebuah SLB di Kota Makassar, melayani peserta didik dengan lima jenis hambatan, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Keberagaman jenis hambatan ini menuntut sekolah menyediakan

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003); Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2016).

[2] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2020).

[3] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

[4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

[5] Kementerian Pekerjaan Umum, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan* (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum, 2006).

fasilitas yang beragam pula. Dalam praktiknya, ketersediaan fasilitas tidak selalu sejalan dengan kebutuhan setiap kelompok siswa. Karena itu, perlu diketahui fasilitas apa saja yang sudah tersedia, fasilitas apa yang masih kurang, serta bagaimana guru dan sekolah menyikapi keterbatasan tersebut.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan fasilitas di SLB masih menghadapi persoalan. Studi di SLB Negeri Punung, Pacitan, menemukan keterbatasan dana, ketidaksesuaian sebagian alat dengan kebutuhan siswa, serta pemeliharaan dan jumlah alat bantu yang belum optimal.[6] Penelitian di SLB C Tunas Harapan Karawang menegaskan perlunya penguatan media adaptif, aksesibilitas, dan pemeliharaan melalui perencanaan berbasis kebutuhan.[7] Tinjauan literatur juga menunjukkan bahwa fasilitas yang dirancang khusus dan dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan partisipasi siswa, tetapi distribusinya belum merata.[8] Sementara itu, penelitian di SLB Negeri Cileunyi mengungkapkan bahwa kenyamanan siswa lebih ditentukan oleh kesesuaian rancangan fasilitas dengan kebutuhan sensorik, motorik, dan kognitif daripada oleh banyaknya fasilitas.[9] Kajian-kajian tersebut umumnya memotret satu jenis hambatan atau satu aspek fasilitas, sehingga gambaran tentang SLB yang melayani banyak jenis hambatan sekaligus masih terbatas.

Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara dengan guru, sekolah ini telah memiliki sebagian besar sarana yang dibutuhkan, tetapi masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, khususnya fisioterapi bagi siswa tunadaksa. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan layanan siswa dan daya dukung fasilitas yang tersedia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaparan kondisi fasilitas berdasarkan lembar observasi terstruktur yang dipadukan dengan pandangan langsung guru di sebuah SLB negeri yang melayani lima jenis hambatan sekaligus.

[6] Ahmad Musyafa, Luqi Darmawan, dan Muhammad Syuhada' Subir, "Analisis Efektifitas Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Proses Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus: Studi Kasus di Sekolah Luar Biasa," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 2 (2025): 5856–64.

[7] Jihan Indah Septiyani dan Hinggil Permana, "Analisis Sarana dan Prasarana pada Sekolah Luar Biasa C Tunas Harapan Karawang," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026): 377–92.

[8] Ermelinda Yosefa Awe, Nyoman Dantes, dan Desak Putu Parmiti, "Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus," *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* 8, no. 6 (2025): 879–88.

[9] Annisa Ramadhani Royani, Qudrotul Falahiyah, dan Wahyu Buana Putra, "Kenyamanan Siswa Berkebutuhan Khusus terhadap Fasilitas Sekolah di SLB Negeri Cileunyi," *Kreasi* 11, no. 2 (2026): 235–52.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kondisi fasilitas dan aksesibilitas di SLB tersebut; (2) mengidentifikasi tantangan yang muncul akibat keterbatasan fasilitas; serta (3) mendeskripsikan cara sekolah dan guru mengatasi keterbatasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan menggambarkan kondisi fasilitas sebagaimana adanya dan memahami pengalaman guru dalam menghadapi keterbatasan tersebut, bukan menguji hubungan antarvariabel. Penelitian dilaksanakan di sebuah SLB di Kota Makassar pada hari Jumat, 20 November 2026. Data dikumpulkan melalui dua teknik. Pertama, observasi langsung terhadap gedung, ruang, dan kegiatan sekolah dengan lembar observasi berisi 27 butir yang dikelompokkan dalam enam aspek, yaitu akses dan keamanan gedung, ruang belajar dan ruang pendukung, alat bantu dan media belajar, kebutuhan dasar sekolah, perawatan dan bantuan, serta akibat dan cara mengatasi. Setiap butir dicentang pada kolom “Ada” atau “Tidak Ada” dan dilengkapi catatan singkat bila diperlukan. Kedua, wawancara dengan guru menggunakan pedoman yang memuat pertanyaan tentang fasilitas khusus, kesesuaian media pembelajaran, dampak keterbatasan fasilitas, strategi guru, dukungan pemerintah, dan kebutuhan prioritas.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap, yaitu pengelompokan hasil observasi dan wawancara ke dalam tema, penyajian data dalam bentuk uraian dan tabel, serta penarikan simpulan, mengikuti alur kondensasi, penyajian, dan verifikasi data dalam analisis kualitatif.[10] Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik, yaitu membandingkan catatan pada lembar observasi dengan keterangan guru. Perbedaan di antara keduanya tidak dihilangkan, tetapi dilaporkan dan dibahas sebagai bagian dari temuan. Keterbatasan penelitian ini adalah data wawancara bersumber dari satu guru dan observasi dilakukan pada satu hari kunjungan sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan empat fokus temuan utama: (1) kondisi fasilitas dan aksesibilitas berdasarkan observasi, (2) fasilitas yang masih kurang, (3) dampak

[10] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

keterbatasan fasilitas menurut guru, serta (4) cara sekolah dan guru mengatasi keterbatasan. Rekapitulasi hasil observasi disajikan pada Tabel 1 dan ringkasan temuan pada Tabel 2.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Lembar Observasi Fasilitas SLB di Kota Makassar

Aspek yang diamati (jumlah butir)	Ada	Tidak ada	Keterangan
A. Akses dan keamanan gedung (6)	6	0	Ramp, guiding block dan pegangan tangan, toilet disabilitas, kelas luas, jalan masuk, dan jalur darurat tersedia
B. Ruang belajar dan ruang pendukung (5)	4	1	Ruang terapi atau latihan mengurus diri tidak ada
C. Alat bantu dan media belajar (6)	5	0	Butir komputer dan internet belum terisi
D. Kebutuhan dasar sekolah (3)	3	0	Listrik, air bersih, dan tempat sampah tersedia
E. Perawatan dan bantuan (3)	3	0	Bantuan berupa dana BOS
F. Akibat dan cara mengatasi (4)	2	2	Guru membuat media sendiri dan orang tua atau warga membantu; kesulitan siswa dan gangguan belajar tidak teramati saat observasi
Jumlah (27)	23	3	1 butir belum terisi

Sumber: Lembar observasi fasilitas, 20 November 2026.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Observasi dan Wawancara

Aspek	Temuan	Implikasi
Akses dan fasilitas dasar	Sebagian besar fasilitas tersedia; jalan masuk dinilai guru masih kurang bagus	Sarana dasar sudah mendukung, tetapi akses jalan masih perlu dibenahi
Fasilitas terapi	Tidak ada ruang terapi; fisioterapi untuk tunadaksa masih kurang dan menjadi kebutuhan prioritas menurut guru	Layanan bagi siswa tunadaksa belum sepenuhnya terpenuhi
Dampak keterbatasan	Menurut guru, keterbatasan fasilitas sangat menghambat pembelajaran dan membuat siswa sulit melakukan aktivitas	Kekurangan fasilitas berpengaruh langsung pada proses belajar
Strategi guru	Guru berinisiatif membuat media dan mencari cara mengajar lewat telepon genggam	Kekurangan sarana ditutup oleh kreativitas guru
Strategi sekolah dan dukungan	Sekolah mengadakan kebutuhan dengan dana BOS; bantuan pemerintah dinilai memadai; kepala sekolah baru mengusahakan fasilitas baru	Ada upaya pemenuhan fasilitas, tetapi belum menyasar fisioterapi

Sumber: Hasil observasi dan wawancara dengan guru, 20 November 2026.

Kondisi Fasilitas dan Aksesibilitas

Akses dan Kebutuhan Dasar

Hasil observasi menunjukkan bahwa dari 27 butir, 23 butir tercatat tersedia.[11] Pada aspek akses dan keamanan gedung, seluruh enam butir terpenuhi, yaitu jalan miring (ramp), jalur khusus tunanetra beserta pegangan tangan, toilet yang mudah dan aman dipakai siswa

[11] Lembar observasi fasilitas SLB di Kota Makassar, 20 November 2026.

disabilitas, ruang kelas yang luas, jalan masuk yang rata dan aman, serta jalur dan tanda aman saat keadaan darurat. Kebutuhan dasar sekolah juga terpenuhi, yaitu listrik, air bersih, dan tempat sampah.

Ruang Belajar dan Alat Bantu

Sekolah memiliki ruang keterampilan, perpustakaan atau pojok baca, serta lapangan atau tempat bermain yang aman. Alat bantu untuk berbagai jenis hambatan juga tersedia, yaitu alat bantu tunanetra seperti Braille dan alat peraga raba, alat bantu tunarungu, serta alat bantu siswa tunadaksa seperti kursi roda dan alat bantu jalan. Alat dan media belajar serta alat praktik keterampilan dicatat cukup. Guru menilai toilet sudah memadai, sedangkan akses jalan masih kurang bagus.

Fasilitas yang Masih Kurang

Kekurangan paling menonjol adalah ruang terapi atau latihan mengurus diri yang tidak tersedia, serta fisioterapi bagi siswa tunadaksa. Temuan ini muncul secara konsisten pada lembar observasi, catatan lapangan, kesimpulan pengamat, dan wawancara. Ketika ditanya fasilitas apa yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru menjawab bahwa fisioterapi sangat dibutuhkan dan di sekolah masih kurang.[12] Menurut catatan lapangan, layanan semacam itu biasanya hanya ada pada guru tertentu yang memiliki kemampuan tersebut. Selain itu, butir komputer dan internet belum dapat dipastikan ketersediaannya karena tidak terisi pada lembar observasi, sedangkan guru menyebut masih ada beberapa media yang harus diadakan.

Dampak Keterbatasan Fasilitas

Guru menjelaskan bahwa setiap ABK memiliki hambatan yang berbeda sehingga fasilitasnya pun berbeda; misalnya, anak tunadaksa harus memiliki fasilitas khusus. Guru menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas sangat menghambat proses belajar mengajar karena anak menjadi sulit melakukan pembelajaran dan aktivitasnya. Pada saat observasi, butir kesulitan siswa dalam bergerak atau memakai fasilitas dan butir gangguan kegiatan belajar dicatat tidak teramati. Perbedaan antara hasil observasi satu hari dan pengalaman sehari-hari guru ini menunjukkan bahwa dampak keterbatasan fasilitas mungkin tidak selalu terlihat dalam pengamatan singkat.

[12] Wawancara dengan guru SLB di Kota Makassar, Makassar, 20 November 2026.

Cara Sekolah dan Guru Mengatasi Keterbatasan

Ketika alat bantu tidak tersedia, guru mengambil inisiatif sendiri, misalnya mencari cara mengajar melalui telepon genggam dan memberikan materi lewat telepon genggam. Pada lembar observasi, guru membuat sendiri alat atau media belajar dicatat ada. Dari sisi sekolah, kebutuhan diadakan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Guru menilai bantuan pemerintah sudah memadai, dan kepala sekolah yang baru sedang mengusahakan fasilitas baru. Fasilitas yang rusak juga tercatat segera diperbaiki, dan sekolah memiliki petugas atau jadwal perawatan. Selain itu, orang tua dan warga sekitar tercatat ikut membantu menyediakan atau memperbaiki fasilitas.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SLB yang diteliti telah menyediakan sebagian besar fasilitas dasar dan alat bantu bagi lima jenis hambatan yang dilayaninya, sehingga kesimpulan pengamat bahwa fasilitas secara umum memadai didukung oleh data. Namun, kebutuhan yang belum terpenuhi terpusat pada satu kelompok, yaitu siswa tunadaksa, yang membutuhkan fisioterapi dan ruang terapi. Ketimpangan layanan ini bukan berasal dari ketiadaan fasilitas secara umum, melainkan dari tidak meratanya pemenuhan kebutuhan antarjenis hambatan.

Pola tersebut sejalan dengan pandangan Booth dan Ainscow bahwa hambatan belajar dan partisipasi tidak hanya bersumber dari kondisi individu, tetapi juga dari lingkungan dan cara sekolah mengatur sumber dayanya.[13] Bagi siswa tunadaksa, ketiadaan ruang terapi dan layanan fisioterapi merupakan hambatan lingkungan yang berdampak langsung pada kesempatan mereka untuk bergerak, berlatih keterampilan motorik, dan mengikuti kegiatan belajar secara mandiri. Temuan bahwa kenyamanan siswa lebih ditentukan oleh kesesuaian fasilitas daripada jumlahnya[14] juga relevan di sini: capaian 23 dari 27 butir observasi belum tentu berarti seluruh kebutuhan terpenuhi apabila butir yang kurang justru menyangkut layanan yang paling dibutuhkan kelompok tertentu.

Strategi guru memanfaatkan telepon genggam menunjukkan kreativitas dan kemampuan menyesuaikan diri. Namun, strategi tersebut bersifat darurat dan bergantung pada inisiatif individu, sehingga tidak dapat menggantikan layanan terapi yang membutuhkan sarana dan tenaga khusus. Pemenuhan fasilitas yang menjadi tanggung

[13] Tony Booth dan Mel Ainscow, *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools* (Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education, 2002).
[14] Royani, Falahiyah, dan Putra, "Kenyamanan Siswa Berkebutuhan Khusus."

jawab sekolah dan pemerintah tetap perlu diprioritaskan agar guru tidak menanggung kekurangan sarana sendirian. Kreativitas guru membuat media sendiri juga ditemukan di SLB lain yang menghadapi keterbatasan alat, misalnya melalui pemanfaatan barang bekas dan modifikasi metode.[15] Praktik ini patut diapresiasi, tetapi penelitian di Karawang mengingatkan bahwa solusi jangka panjang tetap memerlukan perencanaan berbasis kebutuhan, pemeliharaan, dan evaluasi berkala.[16] Dalam kerangka akomodasi yang layak, tanggung jawab penyediaan layanan terapi dan alat bantu berada pada penyelenggara pendidikan, bukan pada inisiatif guru semata.[17]

Dukungan yang sudah ada, yaitu dana BOS, bantuan pemerintah, upaya kepala sekolah baru, serta bantuan orang tua dan warga, menunjukkan bahwa pemenuhan fasilitas melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dukungan ini perlu diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Keterbatasan penelitian ini adalah data wawancara berasal dari satu guru dan observasi dilakukan pada satu hari, sehingga kajian lanjutan perlu melibatkan kepala sekolah, lebih banyak guru, orang tua, dan observasi pembelajaran yang lebih menyeluruh.

Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan fasilitas SLB yang melayani lima jenis hambatan sekaligus dengan memadukan lembar observasi terstruktur dan pandangan guru. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kecukupan fasilitas secara umum dapat menutupi ketimpangan antarjenis hambatan, sebagaimana tampak pada kebutuhan fisioterapi dan ruang terapi bagi siswa tunadaksa. Temuan ini melengkapi kajian terdahulu yang umumnya memotret satu jenis hambatan atau satu aspek fasilitas, sekaligus menunjukkan perlunya evaluasi fasilitas SLB yang dipilah menurut kebutuhan setiap kelompok siswa.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan beberapa solusi sebagai berikut.

1. **Menjadikan fisioterapi dan ruang terapi sebagai prioritas.** Sekolah dan dinas pendidikan menempatkan pengadaan ruang terapi dan layanan fisioterapi bagi siswa tunadaksa sebagai prioritas anggaran.

[15] Musyafa, Darmawan, dan Subir, "Analisis Efektifitas Sarana."
[16] Septiyani dan Permana, "Analisis Sarana dan Prasarana."
[17] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020*; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023*.

2. **Kerja sama dengan tenaga fisioterapi.** Sekolah menjalin kerja sama dengan tenaga kesehatan atau lembaga terkait agar layanan terapi dapat diberikan secara berkala.
3. **Penyediaan media pembelajaran yang masih kurang.** Pemerintah dan sekolah melengkapi media dan alat bantu belajar agar guru tidak bergantung pada media darurat.
4. **Perbaikan akses jalan.** Sekolah memperbaiki jalan menuju dan di lingkungan sekolah yang dinilai guru masih kurang bagus.
5. **Rencana pemenuhan fasilitas yang terukur.** Kepala sekolah menyusun rencana bertahap pemenuhan fasilitas yang disertai target waktu dan sumber pendanaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas di SLB yang diteliti secara umum sudah memadai dan mendukung kegiatan belajar siswa berkebutuhan khusus, dengan 23 dari 27 butir observasi tercatat tersedia. Namun, masih terdapat kekurangan fasilitas tertentu, yaitu ruang terapi dan fisioterapi bagi siswa tunadaksa, yang menurut guru sangat menghambat pembelajaran. Sekolah dan guru mengatasinya melalui dana BOS, inisiatif guru membuat media belajar melalui telepon genggam, dan upaya kepala sekolah baru mengadakan fasilitas.

Agar kualitas layanan meningkat, diperlukan pemenuhan fisioterapi dan ruang terapi, kelengkapan media pembelajaran, serta perbaikan akses jalan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak narasumber dan observasi pembelajaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Awe, Ermelinda Yosefa, Nyoman Dantes, dan Desak Putu Parmiti. "Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus." *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* 8, no. 6 (2025): 879–88.

Booth, Tony, dan Mel Ainscow. *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education, 2002.

Kementerian Pekerjaan Umum. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum, 2006.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang*

Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed. ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Musyafa, Ahmad, Luqi Darmawan, dan Muhammad Syuhada' Subir. "Analisis Efektifitas Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Proses Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus: Studi Kasus di Sekolah Luar Biasa." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 2 (2025): 5856–64.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2016.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2020.

Royani, Annisa Ramadhani, Qudrotul Falahiyah, dan Wahyu Buana Putra. "Kenyamanan Siswa Berkebutuhan Khusus terhadap Fasilitas Sekolah di SLB Negeri Cileunyi." *Kreasi* 11, no. 2 (2026): 235–52.

Septiyani, Jihan Indah, dan Hinggil Permana. "Analisis Sarana dan Prasarana pada Sekolah Luar Biasa C Tunas Harapan Karawang." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026): 377–92.